

**LAMPIRAN III.1**  
**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013**

**KABUPATEN PEKALONGAN**

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Ada	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah <sup>1</sup> seluruhnya $\frac{1.142}{3.178} \times 100 \%$	- Jumlah rumah ber IMB s.d. akhir Tahun 2013, sebanyak 1.142 unit. - Jumlah seluruh rumah s.d. akhir Tahun 2013, sebanyak 3.178 Unit.	39,08 %	
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Perda Kabupaten Pekalongan No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031	Ada	
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sedah terekam dalam E- KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	..... %	
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Perda Kabupaten Pekalongan No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	WNI Rp. 7.500 WNA Rp. 10.000	Sepanjang E-KTP belum dilaksanakan
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparap Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2013 dibagi 1.045.320 penduduk x 100 % $\frac{80}{1.045.320} \times 100 \%$	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2013, sebanyak = 80 orang - Penduduk pada akhir tahun 2013, berjumlah = 1.045.320 orang	7,653 per 10.000 penduduk	

<sup>1</sup> Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukiman maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Perda Kabupaten Pekalongan No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum	Ada	
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Perda Kabupaten Pekalongan No. 2 tahun 2001 tentang Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	Ada	
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2011,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 28 Maret 2013 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/274 tanggal 26 Maret 2013.	Tepat	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2012, disampaikan pada tanggal 5 Februari 2013 sesuai surat pengantar Nomor 900/18 tanggal 5 Februari 2013  - Laporan Kinerja tahun 2012. disampaikan pada tanggal ---- 2013 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal ----- 2013	Tepat  Tepat/tidak	
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 2 urusan, yaitu 1) Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2) Urusan Pekerjaan Umum	2 urusan	<b>SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2012, sebanyak 1 urusan. Permen PU RI No.14/PRT/M/2010</b>

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Klnerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2013	Jumlah MoU yang masih berlaku pada tahun 2013, sebanyak 13 MoU yang terdiri dari: 1) MoU Nomor : 188/1/MOU/2013 Antara Bupati Pekalongan dan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Raperda Bangunan Gedung; 2) MoU Nomor : 420/2/MOU/2013 Antara Pemkab Pekalongan dengan UPS Tegal tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 3) MoU Nomor : 416/3/MOU/2013 Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Yayasan Damandiri tentang Posdaya sebagai Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan; 4) MoU Nomor : 919/4/MOU/2013 antara Bupati Pekalongan dengan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Persetujuan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pekalongan Tahun anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah 5) MoU Nomor : 912/6/MOU/2013 dengan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2013; 6) MoU Nomor : 913/7/MOU/2013 dengan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2013; 7) MoU Nomor : 919/8/MOU/2013 Persetujuan Bersama Bupati dengan DPRD	13 MoU	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Klnerja	Keterangan
						Kab. Pekalongan tentang Perubahan APBD Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2013; 8) MoU Nomor : 188/9/MOU/2013 dengan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Program Legislasi Daerah 2014. 9) MoU Nomor : 912/10/MOU/2013 dengan DPRD Kab. Pekalongan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2014. 10) MoU Nomor : 913/11/MOU/2013 dengan DPRD Kab. Pekalongan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2014. 11) MoU Nomor : 978.5/12/MOU/2013 tentang Nota Kesepahaman Antara BNPB dengan Pemkab. Pekalongan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana TA. 2013. 12) MoU Nomor : 660.1/13/MOU/2013 MOU Antara Pemkab. Pekalongan dengan Paklim G12 dan Kementrian LH RI tentang Pelaksanaan Paklim Wilayah Kerja 2 Pengembangan Strategi Kota yang terpadu dalam Perubahan Iklim. 13) MOU dengan Institute Perguruan Tinggi IPB Bogor tentang Naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Institut Pertanian Bogor Nomor 074/17/MOU/2010		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> <sup>2</sup> $\frac{11}{11} \times 100\%$	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 11 program.  - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas-	100 %	
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100% $\frac{26}{26} \times 100\%$	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2013 (APBD) = 26 urusan.	100 %	Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2013 APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2013	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2013	Perda Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2013.	Tepat	Tepat karena ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2012.
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Perda Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.	Ada	
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% $\frac{982.799.298.581}{1.267.350.685.150}$ = 77,55%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2013. 1) Urusan Pendidikan Rp. 591.151.487.829,- 2) Urusan Kesehatan Rp. 208.422.656.452,- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. 7.488.940.946,- 4) Urusan PU Rp. 143.081.489.852,- 5) Urusan Sosial Rp. 6.920.454.416,- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. 949.630.100,- 7) Urusan Koperasi Rp. 9.215.814.174,- 8) Urusan Satpol PP Rp. 9.460.665.588,- 9) Urusan Kependkn & Capil Rp. 6.108.159.224,- Total Belanja pelayanan dasar Rp. 982.799.298.581,-  Total Belanja APBD 2013, sebesar Rp.1.267.350.685.150,-	77,55 %	

<sup>2</sup> Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
		18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100% $\frac{799.574.144.281}{1.267.350.685.150} \times 100\%$ = 63,09%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2013. 1) <u>Urusan Pendidikan</u> Rp. 591.151.487.829,- 2) <u>Urusan Kesehatan</u> Rp. 208.422.656.452,- Total Belanja Pend & Kes Rp. 799.574.144.281,-	63,09 %	
	Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> <sup>3</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	- Perbup Pekalongan No.45 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinas Perhubungan; - Perbup Pekalongan No. 52 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dipenda Kab. Pekalongan; - Perbup Pekalongan No. 53 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dishutbun Kab. Pekalongan; - Perbup Pekalongan No. 54 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinkop dan UKM; - Perbup Pekalongan No. 55 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Distanak Kab. Pekalongan; - Perbup Pekalongan No. 56 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur	Ada	

<sup>3</sup> Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Klnerja	Keterangan
						<p>Pelayanan Publik (SOP) pada Dinsos PM dan KB;</p> <p>-Perbup Pekalongan No. 57 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinas LHK Kab. Pekalongan;</p> <p>-Peraturan Bupati Pekalongan No. 58 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dislutkan Kab. Pekalongan;</p> <p>-Perbup Pekalongan No. 59 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik(SOP) pada Dinas Kesehatan;</p> <p>-Peraturan Bupati Pekalongan No. 60 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Disperindag dan PM;</p> <p>-Peraturan Bupati Pekalongan No. 61 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinas Pendidikan;</p> <p>-Peraturan Bupati Pekalongan No. 62 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada DPU Kab. Pekalongan;</p> <p>-Peraturan Bupati Pekalongan No. 63 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada BP RSUD Kraton;</p> <p>-Peraturan Bupati Pekalongan No. 64 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kapeditel &amp; Arsipda;</p>		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Pekalongan No. 65 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kantor PSDA;</li> <li>- Peraturan Bupati Pekalongan No. 66 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kandukcapil;</li> <li>- Peraturan Bupati Pekalongan No. 67 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kantor Nakertran;</li> <li>- Peraturan Bupati Pekalongan tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kantor Parbud;</li> <li>- Peraturan Bupati Pekalongan No. 4 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pekalongan No. 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;</li> </ul>		
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	$\frac{\text{Jumlah PNS kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}}$ $\frac{10.484}{952.346}$	<p>Jumlah PNS kabupaten tahun 2013 sebanyak – 10.484 orang.</p> <p>Jumlah penduduk kabupaten tahun 2013 sebanyak 952.346 orang-</p>	0,01	
			21	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Sistem database: SIMPEG	Ada	7.659 record

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kelembagaan	22	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb: 1) Bagian (Setda) = 9 unit 2) Sekretariat DPRD = 1 unit 3) Dinas = 12 unit 4) Badan = 6 unit 5) Kantor = 5 unit 6) Rumah Sakit = 2 unit 7) Lembaga Teknis lainnya = ----- unit 8) <u>Kecamatan/Distrik</u> = 19 unit Jumlah SKPD = 54 unit	54 unit	
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2013	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2013, sebanyak 9 Perda (Daftar terlampir)	9 PERDA	
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2013	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2013 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2013 $\frac{9}{9} \times 100\%$	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2013, sebanyak 9 RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2013, sebanyak 9 PERDA.	100 %	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2013 x 100% $\frac{32}{32} \times 100\%$	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 32 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 32 keputusan.	100 %	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2013 x 100% $\frac{806}{806} \times 100\%$	- Keputusan Bupati tahun 2013, sebanyak – 806 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2013 yang ditindaklanjuti, sebanyak 806 keputusan.	100 %	
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti	- Peraturan Bupati dalam tahun 2013, sebanyak 56 Perbup.	100 %	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
					dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2013 x 100% $\frac{56}{56} \times 100\%$	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 56 Perbup.		
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% $\frac{0}{3} \times 100\%$	Perda yang dibatalkan sebanyak 0 buah, Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 3 buah.	0 %	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Perbup Pekalongan No. 46 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Ada	
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI Hukum), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pekalongan No. 33 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pekalongan.	Ada	JDI dalam menginformasikan Produk hukumnya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan.
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% $\frac{856.476.944.030}{854.065.106.337} \times 100\%$ = 100,28%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2013 sebesar Rp. 856.476.944.030,-  Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 854.065.106.337,-	100,28 %	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2013, sebesar Rp 497.634.389.238,-  - DAU Tahun 2013, sebesar	64,75 %	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
					$\frac{497.634.389.238}{768.500.117.000} \times 100\%$ $= 64,75\%$	Rp. 768.500.117.000,-		
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100% $\frac{497.634.389.238}{1.267.350.685.150} \times 100\%$ $= 39,27\%$	- Total Belanja langsung APBD tahun 2013, sebesar Rp 497.634.389.238,- - Total Belanja APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 1.267.350.685.150,-	39,27 %	
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100% $\frac{148.551.087.968,61}{1.238.140.421.502,61} \times 100\%$ $= 12,00\%$	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp 148.551.087.968,61 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. 1.238.140.421.502,61	12,00 %	.
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011, dengan opini: WDP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini: WDP	Opini tahun 2011 = WDP  Opini tahun 2012 = WDP	Opini,; 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i> ); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i> ); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i> ), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i> ). Opini LHP Tahun 2012, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% $\frac{71.763.389.243,61}{1.238.140.421.502,61} \times 100\%$ $= 5,80\%$	- SILPA Tahun 2013, sebesar Rp 71.763.389.243,61,- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. 1.238.140.421.502,61-	5,80 %	Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100% $\frac{1.267.350.685.150}{1.324.660.145.915} \times 100\%$ $= 95,67\%$	- Realisasi Belanja Tahun 2013, sebesar Rp 1.267.350.685.150,- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 1.324.660.145.915	95,67 %	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 $\frac{42}{42} \times 100\%$	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 42 temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2013, sebanyak 42 temuan.	100 %	
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2013 terhadap <u>potensi PAD</u> <sup>4</sup>	Jumlah realisasi PAD 2013 dibagi dengan potensi PAD X 100% $\frac{148.551.087.968,61}{140.593.740.485} \times 100\%$ = 105,66 %	- Realisasi PAD Tahun 2013, sebesar Rp. 148.551.087.968,61 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 140.593.740.485	105,66 %	
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2013- PAD 2012) : PAD 2012 X 100% $\frac{(148.551.087.968,61 - 114.754.954.252)}{114.793.365.902} \times 100\%$ = 29,44%	- Total PAD pada Tahun 2013 sebesar Rp. 148.551.087.968,61 - Total PAD pada Tahun 2012 sebesar Rp. 114.793.365.902,-	29,44 %	
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2013.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2013	Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari 1) ----- 2) ----- 3) ----- 4) Dst -----	..... Penghargaan	
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Maret tahun 2011	Ada (LPSE)	(SK Bupati Pekalongan Nomor 027/33 Tahun 2011 Tanggal 4 Januari 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pekalongan)

<sup>4</sup> Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKP

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Capaian Klnerja	Keterangan
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2013	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2013, sebanyak 615 ijin	615 ijin	SIUP dan IUI